
PERAN PEREMPUAN INDONESIA DALAM PEMBANGUNAN PERTANIAN*(The Role of The Indonesian Woman in Agriculture Development)***Asih Farmia****ABSTRACT**

Gender is not identical with sex. We have known that the man and the woman have to separate role and responsibility as the result of culture constructional. The agriculture development which has gender refraction, actually has caused women resources and the young generation are lower than the man resources, so the woman role does not appear, yet. We can see that the man like as though big domination, on the other hand, the woman has role enough, too. It needs respond toward potency, aspiration and problems of the agribusiness subject (both of the man and the woman), so the planning, activities, evaluation and monitoring, and the report of program/project/empowering activities of the human resources are responsive toward both of agribusiness subject, except target exact, it has to justness, too, It is needed to increase effectivities and efficiency of development program.

Key words : gender, the role of the Indonesian woman.

Program pengarusutamaan gender di Indonesia belum optimal. Karena selain permasalahan yang cukup pelik, ternyata masih ada persepsi dan pemahaman masyarakat tentang gender masih rancu, mengingat istilah itu bukan berasal dari bahasa Indonesia.

Gender tidak identik dengan jenis kelamin. Pembagian peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan sebagai hasil konstruksional sesuai budaya peran dan tanggung jawab dipertukarkan atau berganti sesuai potensi dan kemampuan yang dimiliki.

Peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan dalam aspek kehidupan, kecuali bersifat kodrati sebenarnya tidak baku atau spesifik hanya dapat dilakukan oleh kaum laki-laki atau perempuan saja. Tetapi pada hakekatnya dapat dilakukan sesuai dengan potensi kemampuan yang dimiliki serta didasarkan perkembangan ilmu dan teknologi.

Pandangan yang mengganggap kaum

perempuan dibawah kaum laki-laki menimbulkan dampak negatif mulai dari partisipasi dalam pengambilan keputusan, rendahnya animo dalam berusaha sampai kurang berdayanya perempuan mengingat masih banyak kekerasan yang dilakukan terhadap para perempuan.

Peran gender bersifat dinamis, dipengaruhi oleh umur (generasi tua dan muda, anak-anak dan dewasa), ras, agama, etnik, lingkungan geografi, pendidikan, sosial ekonomi. Oleh itu, karenanya perubahan peran gender sering terjadi sebagai respon terhadap perubahan kondisi sosial ekonomi, budaya, sumberdaya alam dan politik termasuk perubahan yang diakibatkan oleh upaya-upaya pembangunan atau penyesuaian program struktural (*structural adjustment program*) maupun pengaruh dari kekuatan-kekuatan di tingkat nasional dan global.

Pembangunan pertanian juga mensyaratkan adanya peran yang seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam memberikan

kontribusinya. Visi Departemen Pertanian yaitu terwujud masyarakat yang sejahtera khususnya petani melalui pembangunan sistem agribisnis dan usaha-usaha agribisnis yang berdaya saing, kerakyatan, berkelanjutan dan terdesentralistis juga menuntut adanya sumber daya manusia terdidik *skill driven* (termasuk SDM perempuan) sebagai pelaku utama pembangunan pertanian yang menggunakan inovasi teknologi yang ramah lingkungan dan berperspektif pelestarian sumberdaya alam yang terpusat pada kepentingan sumberdaya manusianya (SDM) dalam hal ini SDM laki-laki dan perempuan dengan dicirikan berbasis pada pendayagunaan keragaman sumberdaya lokal dan berkembangnya pelaku ekonomi lokal, baik laki-laki maupun perempuan.

Hal ini membutuhkan komitmen yang tinggi dari para penyelenggara negara untuk merumuskan berbagai program dan kebijakan yang mampu meredam dampak negatif dari penerapan budaya sehingga mampu menghilangkan segala bentuk diskriminasi serta mampu mengakomodasikan permasalahan dan kebutuhan laki-laki dan perempuan dalam kegiatan pembangunan dalam berkesetaraan gender.

Sumberdaya manusia pertanian yang sebagian besar tinggal di pedesaan dengan kemampuan yang minimal tentunya perlu lebih diberdayakan terlebih lagi kaum perempuannya yang nantinya dapat berkembang ikut membantu kegiatan para petani tidak hanya secara fisik tetapi juga diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam hal pemikiran, pengambilan keputusan maupun wewenang yang lebih besar lagi.

Dengan semakin meningkatnya pihak-pihak yang memahami konsep dasar gender yaitu peran tanggung jawab laki-laki dan perempuan di ruang publik maka akan semakin cepat proses perubahan pola pikir untuk mengerti fungsi dan tanggung jawab serta kedudukan antara gender dengan kehidupan yang layak.

Ini juga diharapkan berlaku di bidang pertanian yang notabene kehidupan keluarga petani masih banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Memang di lapangan masih banyak terjadi dimana aktifitas-aktifitas yang dilakukan masih banyak didominasi oleh kaum laki-laki. Mengapa masih ada kesenjangan kinerja SDM Pertanian ini?

Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari, laki-laki dan perempuan keduanya bisa menjalankan peran baik di sektor domestik maupun publik, Namun adanya bias gender menjadikan perempuan belum memperoleh manfaat pembangunan yang sama seperti halnya laki-laki. Oleh karenanya pembangunan harus memberikan hak-hak dan kesempatan yang sama bagi keduanya sesuai dengan peranan dan statusnya dalam keluarga. Karena secara kuantitatif jumlah perempuan lebih banyak dari laki-laki maka ini sebenarnya merupakan asset yang harus di berdayakan agar lebih berdaya guna.

PERAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN PERTANIAN

Mengapa Pengarusutamaan Gender (PUG) perlu diprioritaskan dalam pembangunan ?

Pertanyaan di atas tentunya membutuhkan

jawaban yang nantinya dapat menjadi pemikiran dalam meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan. Ketidaksetaraan gender sebenarnya merugikan bagi kesejahteraan laki-laki dan perempuan karena memiliki dampak bagi kemampuan untuk meningkatkan taraf hidupnya, dan dapat mengurangi produktivitas sehingga menghambat upaya pengentasan kemiskinan. Paradigma lama pembangunan pertanian yang bias gender telah menyebabkan kualitas sumberdaya manusia perempuan dan generasi muda lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki dewasa (yang dianggap sebagai kepala keluarga/ rumah tangga) kalau kita melihat dari jumlah kuantitatif penduduk dimana perempuan lebih besar dari laki-laki maka memang sebaiknya kita juga lebih memberdayakan kaum perempuan sebagai aset yang perlu diperhatikan perannya dalam ikut membantu kaum laki-laki baik secara pemikiran maupun secara teknis di lapangan. Kalau kita melihat kelompok yang kurang beruntung (*disadvantaged group*) ini seharusnya perlu diprioritaskan dalam pembangunan. Norma sosial dan budaya sebagian besar masyarakat Indonesia yang patriarkhi telah menempatkan laki-laki pada sektor publik dan perempuan di sektor domestik. Sebagian besar kegiatan pembangunan dikategorikan berada di sektor publik yang berdampak terhadap lebih rendahnya kesempatan perempuan untuk dilibatkan dalam berbagai kegiatan pembangunan.

Perempuan dalam rumah tangga sangat berperan dalam menyediakan kebutuhan pangan keluarganya. Di berbagai negara produsen pangan dunia, perempuan memiliki peranan penting

dalam proses produksi pangan. Menurut FAO jumlah perempuan yang terlibat di sektor pertanian meningkat dari tahun ke tahun. Jumlah tenaga kerja perempuan dalam sektor pertanian mengalami peningkatan hampir tujuh kali lipat dari tahun 1960 sebanyak 7,43 juta menjadi 49,69 juta pada tahun 2000.

Kondisi Indonesia pada tahun yang sama, tenaga kerja perempuan berjumlah 41,41 juta dan sebanyak 50,28%-nya bekerja di sektor pertanian. Ini menandakan bahwa sektor pertanian merupakan sektor yang menyerap lebih dari separoh total tenaga kerja perempuan di Indonesia. Perempuan pedesaan dalam pertanian dan produksi pangan memerankan posisi kunci. Perempuan berperan pada hampir semua tahapan proses budidaya dari mulai menyiapkan bibit, persemaian, penanaman, perawatan dan pemanenan bahkan terlibat pada pemasarannya. Disini perempuan merupakan pilar utama dalam keluarga tani, bahkan menjadi penopang hidup di kala krisis ekonomi menerpa keluarga.

Keterlibatan perempuan di sektor pertanian disebabkan karena perempuan memiliki rasa tanggung jawab dan kepemilikan yang besar terhadap keluarga. Perempuan lebih responsif dalam mengatasi persoalan pangan keluarga dan upaya peningkatan pendapatan dibandingkan laki-laki. Sehingga kesempatan bekerja di luar rumah sehingga kesempatan bekerja di luar rumah diperoleh oleh para petani perempuan, tetapi nampaknya hal ini lebih karena desakan ekonomi yang memaksa mereka harus bekerja.

Akan tetapi pekerjaan perempuan di sektor pertanian telah dibuat menjadi tak tampak nyata.

Sekalipun bekerja di bidang pertanian, perempuan tetap saja dipandang sebagai ibu rumah tangga dan bukan dipandang sebagai petani. Ini tampak dalam sistem pengupahan. Perempuan diupah lebih rendah dibandingkan dengan kaum pria untuk jenis dan waktu yang sama dengan pria. Inilah yang perlu diluruskan. Semua proses marjinalisasi yang terjadi pada kaum perempuan, bukanlah berarti perempuan itu bodoh untuk mengubah nilai. Perempuan juga mampu jadi perubah nilai kemasyarakatan.

Lalu bagaimana mungkin bisa menempatkan istri petani (perempuan) hanya sebagai pembantu suami yang petani. Bukankah dia istri petani yang juga melakukan usaha tani ? sehingga dia pantas dikatakan sebagai petani karena rumah tangga (petani) berfungsi dalam konteks sistem ekonomi, sosial budaya dan politik yang lebih luas dalam hubungannya dengan keberlanjutan ekologis pertanian.

Bagaimana bisa seorang laki-laki dalam keluarga (suami atau saudara laki-laki) dapat mengambil keputusan sendiri tanpa melibatkan istri, saudara perempuannya atau anak perempuannya dalam pengelolaan keberlanjutan ekologis, ekonomis, budaya dan politik, padahal semua ikut berperan, besar atau kecilnya peran tersebut. Jadi tidak tepat meletakkan penilaian posisi perempuan di sektor pertanian hanya sebagai orang kedua, ketiga, keempat seterusnya.

Di hampir semua komunitas, perempuan pedesaan dalam sektor pertanian cenderung memiliki alokasi waktu kerja lebih besar dibandingkan laki-laki. Distribusi kerja perempuan bervariasi tergantung karakteristik

bangsa, budaya dan situasinya. Pada umumnya peranan perempuan pedesaan sangat vital karena selain terlibat dalam kerja-kerja pertanian, perempuan juga harus bertanggung jawab atas pekerjaan domestik rumah tangga, seperti mengurus anak, memasak dan mengelola kegiatan rumah tangganya.

Persoalannya adalah bagaimana merealisasikan pembagian pekerjaan domestik antara laki-laki dan perempuan secara seimbang. Jika tidak, perempuan di keluarga miskin akan terus menjalani beban ganda.

Keberlanjutan usaha tani akan tercapai bila secara ekologis kualitas sumber daya alam dipertahankan dan kemampuan agroekosistem secara menyeluruh termasuk manusia taninya mampu ditingkatkan. Dengan demikian akan mengarah pada keberlanjutan secara ekonomi dan sosial di mana petani bisa mencukupi keperluan kebutuhan hidup (termasuk pendidikan, kesehatan, jaminan dan sebagainya) dan usaha tani selanjutnya.

Selain hal di atas disini ternyata peran perempuan dalam bidang pertanian dirasakan belum maksimal hal ini juga bisa terlihat dari :

1. Partisipasi dan Manfaat

- a. Dalam kelembagaan kelompok tani, perempuan hanya terpresentasikan sekitar 11% dari sekitar 11,8 juta anggota kelompok tani-nelayan dewasa yang berjumlah 378.684 kelompok (Pusat Penyuluhan Pertanian, 1998).
- b. 22,3% dari total 33.441 anggota Kelompok Taruna Tani.
- c. Terdapat 46.500 KWT (kelompok wanita

- tani) yang beranggotakan sebanyak 933.477 orang (Pusat Penyuluhan Pertanian, 1998).
- d. Dari 12.600 koperasi tani (Koptan) yang dibentuk dalam program Proksi-datani dan Program Peningkatan Penyuluhan Pertanian melalui pemberdayaan Masyarakat Tani Menuju Ketahanan Pangan (1999/2000) tidak ada representasi perempuan dalam kepengurusan dan keanggotaan koperasi pertanian.
 - e. Koperasi Unit Desa didominasi oleh laki-laki, baik pengurus maupun anggota.
2. Akses dan kontrol
 - a. Dari hasil analisis Struktur Ongkos Tani Hortikultura (BPS, 1998) didapatkan (1) berdasarkan kepemilikannya terdapat 92,69% petani laki-laki pemilik lahan dan sisanya (7,32%) perempuan, (2) berdasarkan luas usahatannya, petani laki-laki yang menguasai lahan diatas 0,5 ha sekitar 48% sementara perempuan hanya 3 persen.
 - b. Sekalipun secara statistik perempuan pengusaha UKM hanya tercatat 12% namun dari 22% laki-laki pengusaha yang disurvei oleh Tim ADB pada tahun 2001 menunjukkan bahwa istri mereka bekerja dalam perusahaan dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.
 - c. Sekalipun program Sekolah Lapang Pengendalian Hama terpadu (SLPHT) diintroduksi sejak 1986 namun baru 10 tahun kemudian hanya 22,3 % perempuan dari 103.721 orang peserta SLPHT di seluruh Indonesia (1997/1998) dan 21,5% peserta perempuan dari sebanyak 86.589 peserta pada tahun 1998/1999.
 - d. Pendekatan penyuluhan sistem LAKU (dalam SK bersama Menteri Pertanian dan Mendagri Nomor 223/ Kpts/Um/4/76 dan nomor 76 tahun 1976 dan nomor 240/Kptsn/UM/4/76 tahun 1876) yang menggunakan pendekatan hampan berdampak pada tidak dikutsertakannya perempuan ke dalam *mainstream system* LAKU. Hanya pada petani laki-laki yang tercakup dalam kelompok tani di wilayah kelompok (wilkel).
 - e. Perempuan lebih bertanggung jawab dalam mengembalikan kredit dibandingkan laki-laki. Dari sebanyak 41.322 kelompok tani kecil (KPK) terdapat 40% kelompok wanita, 34% pria dan 26% kelompok campuran, dimana pembayaran kredit lebih lancar KPK Wanita dibandingkan 2 (dua) kelompok lainnya.

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KESENJANGAN KINERJA SDM PERTANIAN

Dari pengamatan berbagai pihak bisa kita lihat mengapa masih ada kesenjangan kinerja SDM pertanian ini, diantaranya :

1. Masih kuatnya sistem nilai dan norma yang menempatkan laki-laki secara *de jure* (hukum) sebagai kepala keluarga yang berdampak terhadap terinternalisasinya sistem nilai yang memberikan akses dan kontrol laki-laki dalam sektor publik dan perempuan di sektor

domestik. Sedangkan proyek/ kegiatan pembangunan pertanian dipersepsikan berada di sektor publik.

2. Belum tersosialisasikan Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 1984 tentang pengesahan konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, termasuk perempuan pedesaan (khususnya Pasal 11 dan pasal 14).
3. Adanya diskriminasi tentang status bekerja perempuan dalam statistik rumah tangga pertanian yang menganggap kepala rumah tangga petani selalu suami, sementara perempuan digolongkan berstatus pekerja keluarga (dikategorikan membantu suami). Realita yang ada bisa kebalikannya terutama pada kasus perempuan sebagai pemilik lahan usahatani dan pada keluarga miskin.
4. Di tingkat lapangan, perencanaan kegiatan penyuluhan masih menekankan pada "*impact point*" teknologi belum pada sumberdaya manusianya.
5. Masih kuatnya pandangan *stereotip* pembagian kerja dan kontrol antara laki-laki di hampir seluruh lapisan masyarakat, sebagai akibat dari masih kuatnya persepsi dimana perbedaan secara biologis antara laki-laki dan perempuan dipandang menjadi nilai-nilai dan norma tentang kepantasan dalam berperilaku bagi laki-laki dan perempuan. Hal ini kemudian berkembang kearah aspek-aspek yang berkaitan dengan hak, kewajiban, kekuasaan dan kontrol terhadap sumbernya.
6. Belum tersedianya data dan informasi terpikah menurut jenis kelamin sehingga sulit untuk

memperoleh kinerja SDM laki-laki dan perempuan yang spesifik lokasi. Kendala ini kemudian berdampak pada sulitnya memperoleh informasi mengenai potensi, kebutuhan dan masalah SDM pertanian terutama SDM perempuan.

KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PEMBANGUNAN PERTANIAN YANG RESPONSIF TERHADAP POTENSI, KEBUTUHAN SERTA MASALAH LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN TANI

Untuk menjawab tantangan dalam kebijakan pembangunan pertanian, yaitu tantangan HAM dan gender yang didukung oleh bukti-bukti di lapangan bahwa laki-laki dan perempuan keduanya adalah pelaku dan pengambil keputusan dalam pengelolaan usaha agribisnis, maka pembangunan pertanian perlu merespon terhadap potensi, aspirasi, kebutuhan, pengalaman dan permasalahan pelaku agribisnis laki-laki dan perempuan.

Dengan demikian semua perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan program / proyek / kegiatan pemberdayaan sumberdaya manusia pertanian yang responsif terhadap kedua kategori pelaku agribisnis tersebut selain tepat sasaran dan berkeadilan, juga ditujukan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi program pembangunan pertanian.

Hal ini membutuhkan komitmen yang tinggi dari penyelenggara untuk merumuskan berbagai kebijakan, program sehingga mampu

meredam dampak negatif penerapan budaya serta menghilangkan segala bentuk diskriminasi serta mampu mampu mengakomodasikan permasalahan dan kebutuhan perempuan dalam kegiatan pembangunan secara berkesetaraan gender.

KESIMPULAN DAN SARAN

Peran wanita khususnya dalam pembangunan pertanian memang dirasakan masih kurang karena masih adanya diskriminasi terhadap partisipasi dan peran wanita dimana wanita masih dianggap sebagai kaum yang lemah.

Kepada para pengambil kebijakan baik ditingkat atas dan tingkat bawah diharapkan memberikan ruang gerak yang lebih besar serta memberikan kesempatan kepada para wanita untuk dapat berperan lebih besar lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 2003. *Pengarusutamaan Gender Masih Perlu Disosialisasikan*. Jakarta.

Departemen Pertanian. 2006. *PUG dalam Program Pembangunan Pertanian*. Jakarta.

Departemen Pertanian. 2006. *Pengarus-utamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Pertanian*. Jakarta.

Hatta, Mutia. 2006. *Gender Tak Identik dengan Jenis Kelamin*. Suara Karya. Jakarta.

------. 2005. *Pengertian Gender dan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan*. Jakarta.

------. 2006. *Indikator Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Pertanian*. Jakarta.

Kementrian Pemberdayaan Perempuan. 2004. *Kesetaraan Gender*. Jakarta.

Prawoto, A, Kotto, F. 2004. *Perempuan : Pilar Pengembangan Pertanian Organik*. Berita Bumi. Jakarta.